

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Sulawesi Barat 2019/2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Provinsi Sulawesi Barat 2019/2020



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI BARAT 2019/2020

ISSN : 2460-268X

No. Publikasi : 76550.2010

Katalog BPS : 4102004.76

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xiv+92 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Dicetak oleh:

Erlangga Grafis

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Agus Gede Hendrayana Hermawan, SE, M.Si.

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat



KATA PENGANTAR

Dalam upaya perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan penentuan kebijakan pembangunan suatu daerah, dibutuhkan serangkaian data statistik. Salah satu di antaranya adalah Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Sulawesi Barat, 2019/2020.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat 2019/2020 merupakan publikasi yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Sulawesi Barat antar waktu dan antar daerah.

Publikasi ini juga menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang dapat diukur sesuai data yang tersedia. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Pengelompokkan menurut bidang dimaksud adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan serta sosial lainnya.

Diharapkan, publikasi ini bermanfaat terhadap berbagai pihak pengguna data terutama Pemerintah Daerah Sulawesi Barat maupun kalangan swasta untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga publikasi ini bermanfaat.

MAMUJU, NOVEMBER 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat

Agus Gede Hendrayana Hermawan, SE, M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

v

DAFTAR GAMBAR

xi

PENDAHULUAN

1

KESEHATAN DAN
GIZI

25

KETENAGAKERJAAN

49

PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN

69

DAFTAR PUSTAKA

85

iii

KATA PENGANTAR

vii

DAFTAR TABEL

xiii

SINGKATAN DAN
AKRONIM

13

KEPENDUDUKAN

39

PENDIDIKAN

59

TARAF DAN
POLA KONSUMSI

77

SOSIAL LAINNYA

87

SUMBER DATA

DAFTAR TABEL

Kependudukan

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin di Sulawesi Barat, 2010 dan 2019.....	16
Tabel 2.2	Luas Wilayah, Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, 2010 dan 2019.....	20
Tabel 2.3	Komposisi Penduduk (%) di Sulawesi Barat, 2011-2019.....	21
Tabel 2.4	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, 2015-2019.....	23

Kesehatan dan Gizi

Tabel 3.1	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir Menurut Berat Badan Bayi yang Dilahirkan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020...	30
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Perempuan yang Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan Terakhir dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	31
Tabel 3.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat yang Digunakan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	33
Tabel 3.4	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenisnya dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	35
Tabel 3.5	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan sedang ber-KB menurut Alat/ Cara KB yang Digunakan di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	36

Pendidikan

Tabel 4.1	Angka Melek Huruf Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	42
Tabel 4.2	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020...	43
Tabel 4.3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2018-2020.....	44
Tabel 4.4	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah /STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	45

Ketenagakerjaan

Tabel 5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	52
Tabel 5.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	53
Tabel 5.3	Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	55
Tabel 5.4	Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	56
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	57

Taraf dan Pola Konsumsi

Tabel 6.1	Perkembangan Kemiskinan di Sulawesi Barat, 2018-2020.....	63
Tabel 6.2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) dan Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran di Sulawesi Barat, 2020.....	66
Tabel 6.3	Angka Garis Kemiskinan (Rp) Menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	67

Perumahan dan Lingkungan

Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	72
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	75
Tabel 7.3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Penerangan Listrik Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	76

Sosial Lainnya

Tabel 8.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	80
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	81
Tabel 8.3	Persentase Rumah Tangga Penerima BPNT dan Jumlah Beras yang Dibeli menggunakan BPNT selama 4 bulan terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rata-Rata Tingkat Pertumbuhan Penduduk per Tahun di Sulawesi Barat, 2000-2010 dan 2010-2019.....	17
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Sulawesi Barat (Jiwa), 2019.....	22
Gambar 3.1	Angka Kesakitan Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, 2010.....	28
Gambar 3.2	Persentase Penduduk yang Pernah Dirawat Inap Menurut Lamanya Dirawat (Hari) di Sulawesi Barat, 2020.....	29
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Perempuan yang Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan Terakhir di Sulawesi Barat, 2020.....	32
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Sulawesi Barat, 2020.....	46
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Sulawesi Barat, 2020.....	47
Gambar 6.1	Perkembangan Kemiskinan di Sulawesi Barat, 2018-2020.....	65
Gambar 6.2	Persentase Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran pada Angka Garis Kemiskinan (Rp) di Sulawesi Barat, 2019-2020.....	68
Gambar 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan daerah tempat tinggal di Sulawesi Barat, 2020.....	73

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
BBLR	Berat Bayi Lahir Rendah
JPS	Jaringan Pengaman Sosial
KB	Keluarga Berencana
RASKIN	Beras Miskin
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMU	Sekolah Menengah Umum
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate
ASFR	Age Specific Fertility Rate
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>

BAB

1

PENDAHULUAN

<https://sulba.bps.go.id>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan politik dan lain sebagainya.

Hasil pembangunan senantiasa diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun disadari, bahwa keragaman budaya, adat istiadat, sumber daya, luas wilayah, serta potensi alam yang ada mengakibatkan beragamnya pula pencapaian hasil-hasil pembangunan antar wilayah.

Oleh sebab itu, monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan. Hal itu untuk melihat sampai sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan serta manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan.

Untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat, diperlukan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat secara periodik melalui berbagai indikator keluaran pembangunan. Dalam hal ini sumber informasi, terutama berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh BPS setiap tahun.

Dalam rangka memberi gambaran capaian

pembangunan yang dirasakan masyarakat di Sulawesi Barat, maka dibuatlah publikasi berjudul “Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat 2019/2020”. Publikasi ini terbit setiap tahun, yang menggambarkan kesejahteraan rakyat mencakup masalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan serta sosial lainnya.

Tujuan Penulisan

Adalah untuk menggambarkan capaian kesejahteraan melalui tren beberapa data penting hasil pembangunan bidang kesejahteraan rakyat Sulawesi Barat selama kurun waktu 2019-2020. Untuk lebih jelasnya:

1. Melihat pola beberapa data penting terkait hasil pembangunan bidang kesejahteraan rakyat di Sulawesi Barat.
2. Melengkapi informasi data-data yang tidak tersedia pada tahun-tahun tertentu, terkait pembangunan bidang kesejahteraan rakyat di Sulawesi Barat.
3. Data yang dicakup dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai alat untuk merencanakan dan memonitoring program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah).

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data primer dan data sekunder, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan sendiri oleh BPS melalui Susenas, Sakernas, SUPAS, Sensus Penduduk dan sebagainya. Data Susenas yang digunakan adalah data dari Susenas tahun 2020 yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2020.

2. Data Sekunder yang digunakan adalah data yang terkait dengan karakteristik sosial ekonomi, yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait.

Pengolahan Data

Pengolahan, mulai dari tahap perekaman data (data entry), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (editing) terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban lainnya. Proses perekaman data baik data kor maupun data modul dilakukan di BPS Kabupaten/Kota.

Konsep dan Definisi

Air Minum Berkualitas (Layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Angka Beban Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Bayi-*Infant Mortality Rate (IMR)* adalah probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kelahiran Menurut Umur-*Age Specific Fertility Rate (ASFR)* adalah banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun.

Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate (TFR)* adalah banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.

Angka Kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin dan atau huruf lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu, yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai pada kelompok umurnya.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga

tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dianggap bekerja.

Indeks Gini merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan).

Kepadatan Penduduk adalah rata-rata banyaknya per kilometer persegi.

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.

Masih Bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Pengangguran adalah mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka adalah mereka yang termasuk:

- yang mencari pekerjaan,
- yang mempersiapkan usaha,
- yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,
- yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja

Pengeluaran adalah pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis

makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pekerja Tidak Dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu suatu usaha untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.

Jaminan Pensiun/Veteran adalah Jaminan pekerja/pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap (sumber UU No 40 Tahun 2004). Manfaat jaminan pensiun umumnya berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan.

Jaminan Hari Tua adalah Program Jaminan yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu (sumber: BPJS Ketenagakerjaan).

Asuransi Kecelakaan Kerja adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Jaminan kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya bertujuan untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan

kerja baik fisik maupun mental. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. (sumber: BPJS

Ketenagakerjaan).

Jaminan/Asuransi Kematian adalah jaminan yang memberikan manfaat berupa santunan kematian yang dibayarkan kepada ahliwaris peserta yang meninggal dunia.

Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah jaminan yang diberikan akibat pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha.

Perkotaan adalah karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor) adalah orang yang mempraktekkan satu metode kontrasepsi.

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Gizi adalah keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategori status gizi ini dibuat berdasarkan Standar WHO/NCHS.

Tamat Sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tidak/Belum Pernah sekolah adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan sekolah.

Tidak Bersekolah Lagi yaitu pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap usia kerja.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persen.

Indikator Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang dijadikan tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam publikasi ini secara ringkas diuraikan metode penghitungannya sebagai berikut:

- *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Indeks*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*

Indeks-P2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

- Foster-Geer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0, 1, 2$

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$)
 $y_i < z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Indeks* (P_0) atau persentase penduduk miskin, $\alpha = 1$, diperoleh *Indeks Kedalaman Kemiskinan* (*Poverty Gap Indeks* P_1), dan $\alpha = 2$, diperoleh *Indeks Keparahan Kemiskinan* (*Poverty Severity Indeks* P_2).

Sistematika penulisan dalam penyajian publikasi ini dibagi dalam delapan bab, yaitu :

1. Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan penulisan, metode survei, konsep dan definisi serta sistematika penulisan.
2. Bab II. Kependudukan berisi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, serta komposisi penduduk.

3. Bab III. Kesehatan dan Gizi berisi status kesehatan penduduk, pemberian ASI, pemanfaatan fasilitas kesehatan dan pemakaian alat/cara KB.
4. Bab IV. Pendidikan berisi angka melek huruf dan tingkat pendidikan serta tingkat partisipasi sekolah.
5. Bab V. Ketenagakerjaan berisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), lapangan usaha dan status pekerjaan, serta jumlah jam kerja.
6. Bab VI. Taraf dan Pola Konsumsi berisi perkembangan kemiskinan, tingkat kesejahteraan, serta pengeluaran rumah tangga berdasarkan angka garis kemiskinan.
7. Bab VII. Perumahan dan Lingkungan berisi kualitas

BAB 2

KEPENDUDUKAN

<https://sulbapubs.go.id>

KEPENDUDUKAN

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya. Manusia sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam untuk tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau investasi atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian munculah istilah baru di luar H.R. (*Human Resources*), yaitu H.C. atau *Human Capital*. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai, dapat dilipatgandakan, dikembangkan dan bukan sebaliknya sebagai *liability* (beban, *cost*). Perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.

SDM diperlukan karena manusia atau penduduk merupakan pelaksana atau subjek pembangunan dan sekaligus penikmat hasil-hasil pembangunan atau objek pembangunan. Perkembangan SDM yang ada di Provinsi Sulawesi Barat bisa dilihat dari jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, serta penduduk menurut pendidikan dan angkatan kerja.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu indikator bahwa jumlah penduduk di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan adalah cukup ditandai terjadinya pemekaran-pemekaran kabupaten, serta wilayah-wilayah pemerintahan yang ada di bawahnya. Kabupaten di Sulawesi Barat bertambah dari lima kabupaten menjadi enam sejak tahun 2013.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin di Sulawesi Barat, 2010 dan 2019

Kabupaten (1)	2010*			2019		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)	Laki-laki (5)	Perempuan (6)	Total (7)
Majene	76,67	77,44	154,11	85,08	88,8	173,88
Polewali Mandar	193,11	203,01	396,12	217,6	224,98	442,58
Mamasa	71,09	68,99	140,08	81,90	80,08	161,97
Mamuju	173,41	163,56	336,97	148,98	144,35	293,33
Pasangkayu	70,25	64,12	134,37	90,27	84,2	174,47
Mamuju Tengah	-	-	0	69	65,03	134,03
Sulawesi Barat	584,53	577,12	1 161,65	692,83	687,42	1 380,26

Catatan:*) Hasil Sensus Penduduk 2010

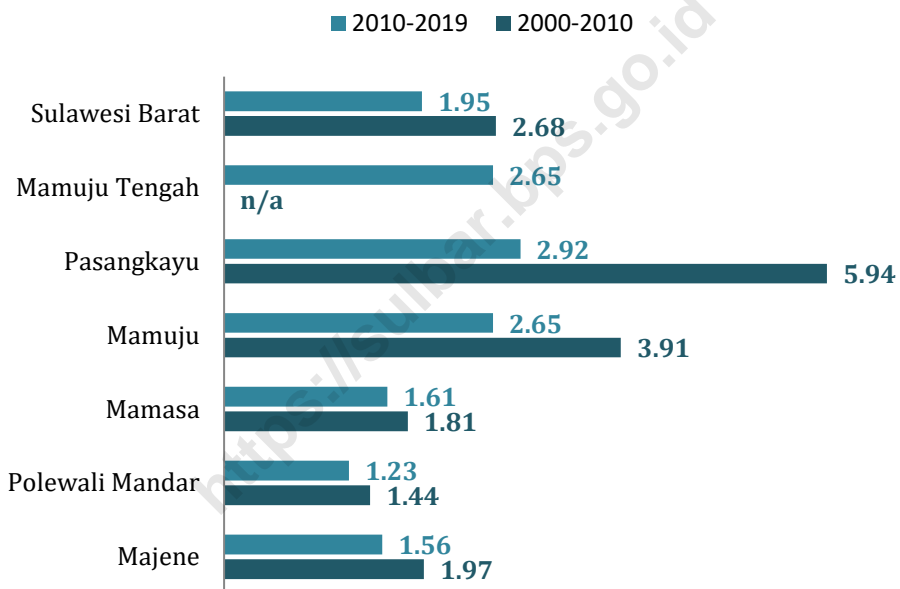
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah penduduk Sulawesi Barat tahun 2019 sebanyak 1.380,26 ribu jiwa, di mana penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dari pada penduduk perempuan yaitu 692,83 ribu jiwa laki-laki dan 687,42 ribu jiwa perempuan. Dalam sembilan tahun terakhir, jumlah penduduk Sulawesi Barat meningkat sebanyak 218,71 ribu jiwa.

Peningkatan penduduk suatu wilayah ditentukan oleh tiga komponen demografi yaitu: kelahiran, kematian dan migrasi. Perubahan ketiga komponen demografi tersebut cukup dipengaruhi oleh hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Pembangunan yang berhasil biasanya akan

diikuti dengan penurunan angka kelahiran yang lebih cepat terhadap penurunan angka kematian, sehingga secara resultan didapat angka pertumbuhan yang rendah. Di sisi lain bila kelangsungan pembangunan berjalan dan berhasil dengan baik maka tingkat migrasi netto akan cenderung negatif, yang artinya akan lebih banyak penduduk yang masuk ketimbang yang keluar dari suatu wilayah.

Gambar 2.1
Rata-Rata Tingkat Pertumbuhan Penduduk per Tahun
di Sulawesi Barat, 2000-2010 dan 2010-2019



Catatan:*) n/a = not available

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Tingkat pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat pada Gambar 2.1 di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat dalam periode 2010-2019 sebesar 1,95 persen per tahun. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat dalam periode 2000-2010 yang tumbuh sebesar 2,68 persen per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 kemungkinan disebabkan oleh migrasi masuk akibat dampak pemekaran wilayah yang

terjadi dalam periode 2000-2010 menjadi Sulawesi Barat. Penurunan pertumbuhan penduduk yang cukup tajam dalam periode selanjutnya 2010-2019, tampak pada 2 kabupaten, yaitu kabupaten Pasangkayu yang turun menjadi 2,92 persen dan Kabupaten Mamuju yang turun menjadi 2,65 persen.

Selama periode 2000-2010, terbentuk 2 wilayah kabupaten baru yaitu kabupaten Mamasa dan Pasangkayu. Jika melihat fenomena yang ada, tampak bahwa Kabupaten Pasangkayu sangat menarik minat penduduk dari luar untuk dijadikan tujuan migran dan menyebabkan tingginya pertumbuhan penduduk pada kabupaten tersebut. Fenomena tersebut tidak tampak pada Kabupaten Mamasa di mana tidak terjadi ledakan tambahan penduduk akibat terbentuknya Kabupaten Mamasa sebagai sebuah kabupaten otonom. Di samping itu, Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk pada tahun 2004 juga menjadi pemicu utama pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat, terutama di Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi. Hal ini tampak dari tingginya pertumbuhan penduduk kabupaten Mamuju pada periode 2000-2010 yang mencapai 3,91 persen per tahun.

Pada periode 2010-2019, pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat tidak selaju pada periode 2000-2010. Pertumbuhan tertinggi masih dialami oleh Kabupaten Pasangkayu dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama 2010-2019 mencapai 2,92 persen per tahun dan pertumbuhan terendah dialami oleh Kabupaten Polewali Mandar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,23 persen per tahun. Selanjutnya dapat dilihat bahwa terdapat 3 kabupaten yang pertumbuhan per tahunnya masih di atas 2 persen, yaitu kabupaten Mamuju (2,65 persen per tahun), Pasangkayu (2,92 persen per tahun) dan Mamuju Tengah (2,65 persen per tahun). Menariknya rata-rata pertumbuhan penduduk Mamuju Tengah selama periode 2010-2019

menyamai pertumbuhan penduduk ibukota Mamuju. Sedangkan, tiga kabupaten lainnya (Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa) memiliki pertumbuhan di bawah 2 persen per tahun.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk antar kabupaten di Sulawesi Barat tampak masih timpang, sehingga menyebabkan kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten sangat tidak merata. Persebaran penduduk di Sulawesi Barat dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan luas wilayah 10,58 persen dari luas Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar dihuni oleh sekitar 32,06 persen penduduk di Sulawesi Barat pada tahun 2019. Kepadatan penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2010 sebanyak 224 jiwa per km² dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai angka kepadatan 249 jiwa per km².

Kabupaten Majene adalah kabupaten terpadat ke-2, yakni 183 jiwa per km², hal ini berarti bahwa setiap 1 kilometer wilayah di Majene secara rata-rata dihuni oleh 183 orang. Jika melihat luas wilayah, Kabupaten Mejene tergolong kabupaten terkecil yakni hanya sekitar 5,64 persen dari total luas wilayah Sulawesi Barat, tetapi penduduk yang menempatnya mencapai 12,6 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat.

Kabupaten yang memiliki tingkat kepadatan terkecil adalah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu sebesar 44 jiwa per km². Kabupaten ini memiliki luas sekitar 17,96 persen dari total luas Sulawesi Barat, jauh lebih besar dari Kabupaten Majene bahkan menempati posisi ketiga dengan wilayah terluas di Sulawesi Barat tetapi penduduknya hanya 9,71 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat.

Tabel 2.2
Luas Wilayah, Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, 2010 dan 2019

Kabupaten	Luas Wilayah		Persentase Penduduk 2019	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
	Luas	Persentase Luas Wilayah		2010	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	947,84	5,64	12,60	160	183
Polewali Mandar	1 775,65	10,58	32,06	224	249
Mamasa	3 005,88	17,91	11,73	47	54
Mamuju	4 999,69	29,78	21,25	47	59
Pasangkayu	3 043,75	18,13	12,64	45	57
Mamuju Tengah	3 014,37	17,96	9,71	n/a	44
Sulawesi Barat	16 787,18	100	100	69	82

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Selama periode 2010-2019 kepadatan penduduk di Sulawesi Barat terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2010 kepadatan penduduk Sulawesi Barat sebesar 69 jiwa per km² meningkat menjadi 82 jiwa per km² pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa selama periode 2010 - 2019 terjadi peningkatan kepadatan sebanyak 13 jiwa per km².

Komposisi Penduduk

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan adalah adanya perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dan semakin tingginya penduduk usia produktif (15-64 tahun) sehingga rasio ketergantungan semakin menurun. Proporsi penduduk

usia tidak produktif pada tahun 2019 sebesar 35,13 persen yang terdiri dari 30,94 persen usia 0-14 tahun dan 4,19 persen usia 65 tahun ke atas. Sementara usia produktif di tahun 2019 sebesar 64,87 persen. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk di Sulawesi Barat, 65 orang merupakan penduduk usia produktif dan 35 orang merupakan usia tidak produktif. Dengan demikian, rasio ketergantungan Sulawesi Barat pada tahun tersebut sebesar 54,14, artinya bahwa 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung sebanyak 54 atau 55 orang usia non produktif. Angka tersebut menunjukkan kecenderungan yang menurun dalam periode 2011-2019.

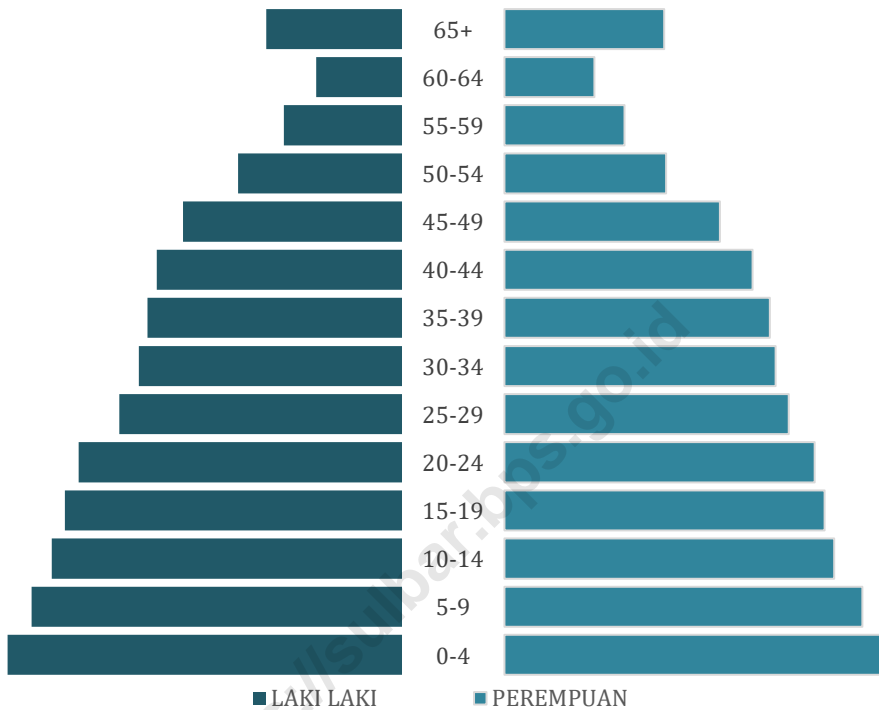
Tabel 2.3
Komposisi Penduduk (%) di Sulawesi Barat 2011-2019

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	36,07	59,89	4,04	67,00
2012	35,01	60,96	4,03	64,00
2013	32,49	63,45	4,06	57,60
2014	32,14	63,8	4,06	56,70
2015	31,82	64,11	4,07	56,00
2016	31,52	64,39	4,09	55,31
2017	31,29	64,60	4,11	54,79
2018	31,10	64,76	4,14	54,41
2019	30,94	64,87	4,19	54,14

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Secara rinci struktur penduduk menurut kelompok umur di Sulawesi Barat pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 2.2. Tampak piramida penduduk yang terbentuk adalah piramida yang mengerucut ke atas yang berarti bahwa semakin sedikit penduduk yang masuk ke dalam kelompok umur tua. Hal ini juga menunjukkan rendahnya

Gambar 2.2
Piramida Penduduk Sulawesi Barat (Ribuk Jiwa), 2019



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

angka rasio ketergantungan penduduk tua. Sedangkan dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi.

Piramida penduduk Sulawesi Barat tahun 2019 dikategorikan *ekspansive* di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Dari gambar piramida tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat cukup tinggi dari faktor kelahiran yang diikuti angka kematian yang rendah. Hal ini khususnya masalah tingginya tingkat kelahiran membutuhkan strategi khusus dalam hal penanggulangan masalah kependudukan.

Bila diamati selama 5 tahun terakhir, penduduk laki-laki

selalu lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Barat yang lebih besar dari 100. Demikian pula bila diamati menurut kabupaten, secara umum setiap kabupaten memiliki pola yang sama selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019). Pada tahun 2019 Sulawesi Barat memiliki rasio jenis kelamin sebesar 100,79 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 0,79 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini berarti setiap 100 orang perempuan terdapat sekitar 101 orang laki-laki. Untuk lebih jelas mengenai rasio jenis kelamin untuk tahun 2015 sampai tahun 2019 dan dirinci menurut masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah.

Tabel 2.4
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat 2015-2019

Kabupaten	Rasio Jenis Kelamin				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	95,51	95,58	95,56	96,05	95,82
Polewali Mandar	95,89	95,93	96,30	96,28	96,72
Mamasa	102,08	101,9	102,25	102,74	102,27
Mamuju	10,67	103,85	103,46	103,24	103,21
Pasangkayu	108,41	108,46	107,81	107,47	107,22
Mamuju Tengah	106,88	106,53	106,56	106,30	106,11
Sulawesi Barat	100,64	100,68	100,72	100,75	100,79

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kabupaten Pasangkayu yakni sebesar 107,22 dan terendah terdapat di Kabupaten Majene yakni sebesar 95,82. Rasio jenis kelamin yang kurang dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Dengan kata lain, terdapat

dua kabupaten di Sulawesi Barat yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu Kabupaten Majene dan Polewali Mandar.

Kabupaten Pasangkayu yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi tersebut dapat dimaklumi mengingat daerah tersebut memiliki daya tarik tersendiri sebagai sasaran pencari kerja karena terbukanya industri-industri pengolahan kelapa sawit disamping perkebunan kelapa sawit. Sementara Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar terjadi sebaliknya, penduduk laki-laki cenderung merantau ke daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan sehingga memiliki rasio jenis kelamin kurang dari 100.

<https://sulbar.bps.go.id>

BAB
3

**KESEHATAN
DAN
GIZI**

<https://eunika.pb.go.id>

KESEHATAN DAN GIZI

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Aspek penting yang mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan lama sakit. Untuk melihat kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jaminan kesehatan yang dimiliki.

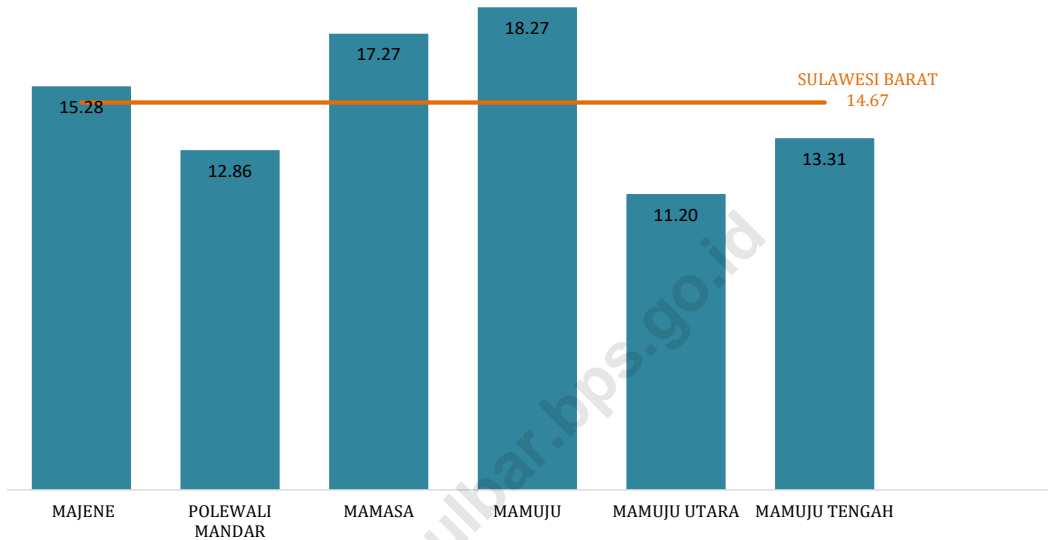
Peningkatan kualitas fisik penduduk tersebut telah dilakukan dengan berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan memelihara mutu pelayanan kesehatan yang sudah ada. Selain itu dilakukan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan seperti pembangunan puskesmas, posyandu, dan rumah sakit; penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat; dan pendistribusian tenaga kesehatan hingga ke pelosok daerah serta sudah tersedianya fasilitas jaminan kesehatan.

Status Kesehatan Penduduk

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Fisik yang baik akan menunjang kelancaran beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka kesakitan, yaitu

persentase penduduk yang mengalami keluhan/gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Gambar 3.1
Angka Kesakitan Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, 2020



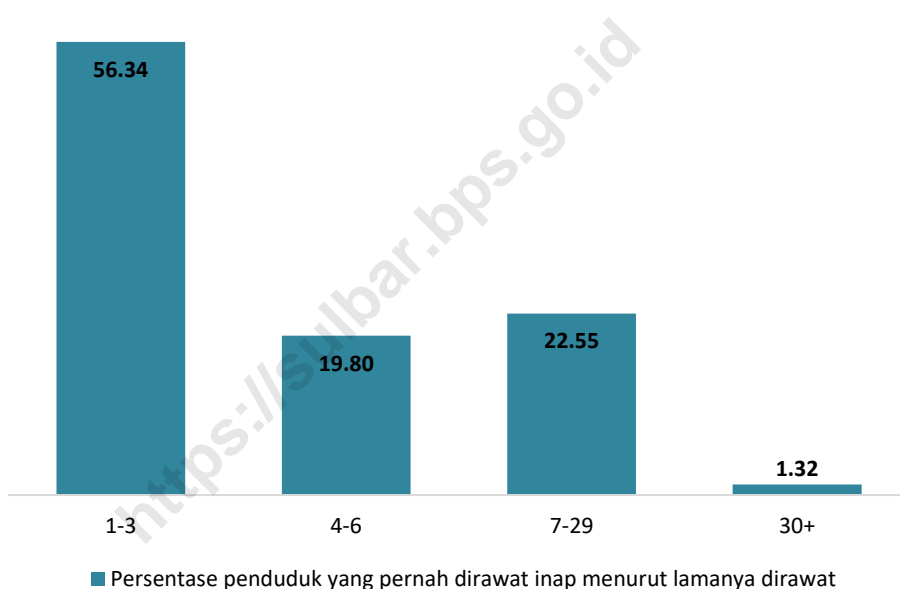
Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Gambar 3.1 menggambarkan angka kesakitan penduduk menurut kabupaten pada tahun 2020. Angka kesakitan di Kabupaten Mamuju paling tinggi di antara enam kabupaten di Sulawesi Barat yaitu sebesar 18,27 persen. Sedangkan persentase angka kesakitan di Kabupaten Mamuju Utara paling rendah yaitu 11,20 persen. Secara umum, pada tahun 2020 di Sulawesi Barat terdapat sekitar 1 sampai 2 orang dari 10 orang yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-harinya.

Persentase penduduk yang pernah dirawat inap menurut lamanya dirawat (hari) dapat di lihat pada Gambar 3.2. Pada tahun 2020 penduduk yang pernah dirawat inap selama tiga hari atau kurang persentasenya paling besar yaitu 56,34 persen, selanjutnya penduduk yang pernah dirawat inap selama empat sampai enam hari sebesar 19,80 persen. Penduduk yang pernah dirawat inap selama 7 sampai 29

hari persentasenya sebesar 22,59 persen. Sedangkan yang pernah dirawat inap diatas 1 bulan (di atas 30 hari) hanya sebesar 1,32 persen yang artinya terdapat sekitar dua orang dari seratus orang yang pernah dirawat inap dan lamanya dirawat lebih dari 30 hari.

Gambar 3.2
Persentase Penduduk yang Pernah Dirawat Inap Menurut Lamanya Dirawat (Hari) di Sulawesi Barat, 2020



Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Dari Gambar 3.2 dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan antara persentase penduduk yang pernah dirawat inap menurut lamanya dirawat (hari) menurun seiring dengan bertambahnya jumlah hari dirawat (lama sakit).

Berat Badan Bayi Saat Lahir

Berat badan bayi saat lahir merupakan salah satu tolak ukur kesehatan bayi kedepannya. Berat badan bayi saat lahir normalnya sebesar 2500 gram (2,5 Kg) hingga 4000 gram.

Tabel 3.1

Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir Menurut Berat Badan Bayi yang Dilahirkan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Berat Badan Bayi	2020		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(3)	(4)	(5)
Di bawah 2,5 kg	8.33	15.36	13.90
Di atas 2,5 Kg	83.69	77.74	78.97
Tidak Ditimbang/Tidak tahu	7.98	6.90	7.13

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Berat badan bayi di bawah 2,5 Kg disebut dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Bayi dengan berat badan rendah akan mengalami masalah nutrisi dan perkembangan di awal-awal kehidupannya. Jika tidak diperbaiki, maka akan meningkatkan resiko masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, karena asupan makanan yang ia konsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Dengan kata lain, semakin kecil berat badan bayi lahir dan semakin cepat bayi lahir, semakin besar juga risiko bayi untuk mengalami masalah kesehatan. Oleh karena itu, BBLR dapat dijadikan sebagai deteksi dini masalah kesehatan pada bayi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa 13,90 persen bayi baru lahir di Sulawesi Barat mengalami BBLR. Di wilayah perkotaan, terdapat 8,33 persen bayi baru lahir yang mengalami BBLR sedangkan di wilayah perdesaan persentasenya meningkat hampir dua kali lipat dari wilayah perkotaan yaitu sebesar 15,36 persen bayi baru lahir mengalami BBLR. Baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan masih ada ibu yang tidak menimbang/tidak mengetahui berat badan bayi yang dilahirkannya yaitu

sebesar masing-masing 7,98 persen dan 6,90 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Tenaga penolong persalinan merupakan salah satu aspek dalam hal peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk selain ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu saat melahirkan, di mana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan selamat. Untuk itu pemerintah terus berusaha mendistribusikan tenaga kesehatan ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk daerah-daerah terpencil, yaitu daerah perdesaan agar dapat menolong para ibu hamil yang dengan bantuan tenaga kesehatan.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk Perempuan yang Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan Terakhir dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Indikator	2020		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(3)	(4)	(5)
Tenaga Kesehatan			
Dokter	36.9	16.56	20.40
Bidan	59.54	73.50	70.61
Perawat	0.00	0.36	0.29
Bukan Tenaga Kesehatan			
Dukun Tradisional	4.17	8.60	7.68
lainnya*	1.19	0.98	1.02

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

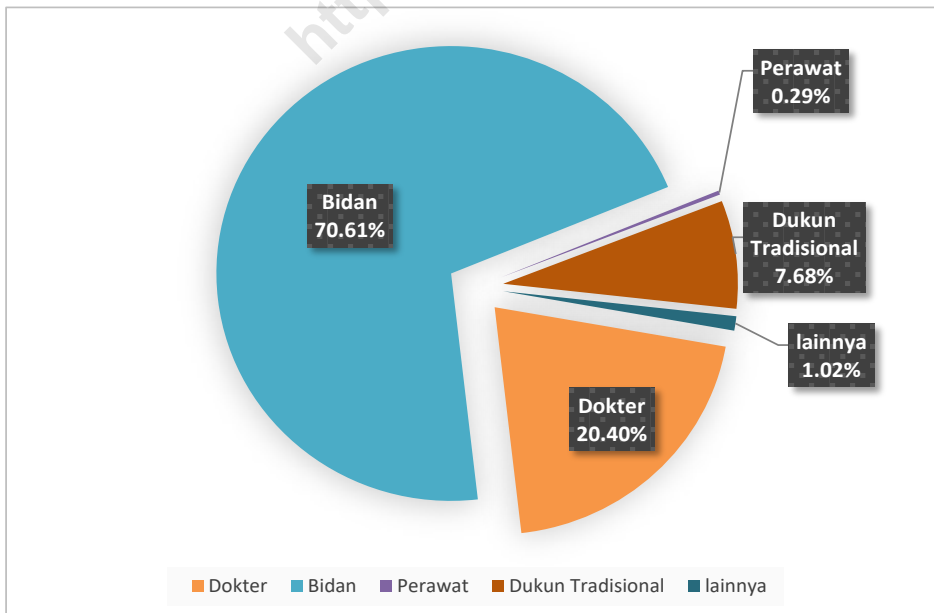
* termasuk yang tidak ada penolong persalinan

Selama periode 2020, secara total terlihat bahwa persentase penduduk wanita yang berumur 15-49 tahun yang melahirkan dalam 2 tahun terakhir menurut penolong persalinan yang ditolong oleh dokter sebesar 20,40 persen. Bidan sebagai penolong persalinan sebesar 70,61 persen. Paling tinggi jika dibandingkan tenaga kesehatan lainnya.

Pada tahun 2020 persentase penduduk wanita yang berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir menurut penolong persalinan di daerah perkotaan dan perdesaan yang terbesar adalah bidan masing-masing sebesar 59,54 persen dan 73,5 persen. Meskipun demikian proses kelahiran di daerah perdesaan yang dibantu oleh dukun masih relatif besar yaitu 8,6 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan, kelahiran dengan penolong persalinan yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan termasuk dukun sebesar 5,36 persen.

Gambar 3.3

Persentase Penduduk Perempuan yang Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Sulawesi Barat, 2020



Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Selain tenaga penolong persalinan bayi, permasalahan kesehatan yang lain adalah tentang upaya pengobatan yang dilakukan penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, baik berobat sendiri maupun berobat jalan. Tempat rujukan penduduk untuk berobat jalan dapat menggambarkan akses penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk di perdesaan berbeda dengan penduduk perkotaan, hal ini dapat disebabkan karena ketersediaan dan jarak ke fasilitas tersebut serta perilaku penduduk itu sendiri. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak yang pergi berobat ke Petugas Kesehatan dan Puskesmas/Pustu dibandingkan di perdesaan, karena di perkotaan fasilitas tersebut cukup banyak tersedia dan jaraknya pun tidak terlalu jauh atau mudah dijangkau. Selain itu kesadaran penduduk perkotaan akan kesehatan juga cenderung lebih baik bila dibandingkan penduduk perdesaan.

Berdasarkan Tabel 3.3, tercatat bahwa bagi penduduk yang berobat jalan mengunjungi Puskesmas/Pustu tetap

Tabel 3.3
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat yang Digunakan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Tempat Berobat	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	11.77	6.61	8.07
Rumah Sakit Swasta	1.53	0.84	1.03
Praktek Dokter/Bidan	21.77	20.59	20.92
Klinik/Praktek Dokter Bersama	5.07	2.42	3.17
Puskesmas/Pustu	55.48	67.78	64.29
UKBM	4.01	4.6	4.43
Praktek Pengobatan Tradisional	1.06	0.54	0.69
Lainnya	3.89	2.24	2.71

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

menjadi pilihan utama. Ini ditandai dengan persentasenya yang besar, yakni sebesar 64,29 persen. Persentase berobat jalan yang paling kecil adalah praktek pengobatan tradisional dengan persentase sebesar 0,69 persen.

Bila dibedakan menurut daerah, maka kecenderungan berobat jalan dengan mengunjungi Rumah Sakit Pemerintah antara wilayah perkotaan dan perdesaan terlihat signifikan perbedaannya. Persentase wilayah perkotaan yakni 11,77 persen sedangkan untuk wilayah perdesaan hanya sebesar 6,61 persen. Namun baik wilayah perkotaan maupun perdesaan pilihan berobat jalan ke praktek pengobatan tradisional adalah yang paling sedikit yakni masing-masing sebesar 1,06 persen dan 0,54 persen.

Pada tahun 2014 Pemerintah menetapkan Program Jaminan Kesehatan (JKN). JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Seiring dengan dilaksanakan Program JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jaminan kesehatan dapat digunakan untuk berobat jalan maupun rawat inap.

Guna melihat pencapaian program JKN maka ditampilkan pada Tabel 3.4 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan menurut jenisnya dan daerah tempat tinggal Tahun 2020. Dari tabel tersebut terlihat bahwa masih terdapat 14,29 persen penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Persentase terbesar

kepemilikan jaminan kesehatan adalah Jamkesmas sebesar 55,29 persen yang kemudian disusul oleh Jamkesda sebesar 36,45 persen. Pada wilayah perkotaan, Jamkesmas dan Jamkesda memiliki persentase yang hampir sama yaitu 47,11 persen dan 47,05 persen. Hanya ada sedikit penduduk yang memiliki asuransi swasta yaitu sekitar 0,19 persen, bahkan hanya 0,09 persen yang memiliki asuransi tersebut di daerah perdesaan.

Tabel 3.4
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenisnya dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Jenis Jaminan Kesehatan (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan+ Perdesaan (4)
NON PBI	29.81	15.97	19.24
JAMKESMAS/PBI	47.11	57.81	55.29
JAMKESDA	47.05	33.18	36.45
ASURANSI SWASTA	0.54	0.09	0.19
ASURANSI PERUSAHAAN/KANTOR	1.25	0.88	0.97
TIDAK MEMILIKI	10.13	15.58	14.29

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Pemakaian Alat/Cara KB

Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengaturan jarak kelahiran.

Tujuan yang lainnya yaitu menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB. Beberapa

alat atau cara KB bisa dipilih oleh masyarakat. Berikut pada Tabel 3.5 di bawah ditampilkan persentase wanita berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang ber-KB menurut alat atau cara KB yang digunakan.

Pada tahun 2019 di Sulawesi Barat, penggunaan alat/cara KB wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin, yang tertinggi adalah Suntik KB dan Pil KB masing-masing

Tabel 3.5
 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan sedang ber-KB menurut Alat/Cara KB yang Digunakan di Sulawesi Barat, 2019-2020

Alat/Cara KB (1)	2019 (2)	2020 (3)
MOW/MOP	1,05	1,75
AKDR/IUD	2,70	3,99
Suntik KB	49,66	47,99
Susuk KB	13,69	15,05
Pil KB	30,30	26,70
Lainnya (Kondom, Intravag/Tisu, dan Tradisional)	2,60	5,15

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2019-2020

49,66 persen dan 30,3 persen. Sedangkan yang terendah adalah MOW/MOP dan Lainnya (Kondom, Intravag/Tisu, dan Tradisional) yakni masing-masing sebesar 1,05 persen dan 2,6 persen.

Selanjutnya pada tahun 2020, penggunaan alat/cara KB yang tertinggi sama seperti tahun 2019 yaitu Suntik KB sebesar 47,99 persen (turun 1,67 poin persen dari tahun 2019), sementara untuk Pil KB persentase penggunaannya juga menurun menjadi 26,7 persen. Berbeda halnya dengan penggunaan susuk KB yang justru meningkat dari 13,69 persen pada tahun 2019 menjadi 15,05 persen di tahun 2020. Selain itu, Penggunaan lainnya (kondom, Intravag/Tisu,

dan Tradisional) meningkat yang hampir 2 kali lipat dari 2,6 persen tahun 2019 menjadi 5,15 persen di tahun 2020.

Penggunaan alat kontrasepsi Suntik KB dan Pil KB relatif besar persentasenya, karena penggunaan alat/cara KB ini cukup praktis, mudah didapatkan, efek sampingnya tidak terlalu besar, mudah pemakaiannya (tidak membuat pemakai malu/risih pada saat pemasangan) serta lebih murah. Wanita berstatus kawin yang relatif sibuk dengan berbagai aktifitas, cenderung memilih kontrasepsi ini. Demikian pula bila pemakai ingin berhenti, bisa dilakukan pada saat diinginkan.

BAB

4

PENDIDIKAN

<https://sulbi.bps.go.id>

PENDIDIKAN

Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin majulah bangsa tersebut. Untuk itu pembangunan di sektor pendidikan perlu diutamakan. Sesuai UUD 1945 Pasal 27 bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, maka seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan kepada beberapa sektor yang merupakan kebutuhan mendasar, karena langsung memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Bahkan, sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya program wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berdampak positif pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Angka Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan

penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf di Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 93,17 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka melek huruf penduduk laki-laki lebih tinggi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Angka melek huruf penduduk laki-laki pada tahun 2020 yaitu 94,84 persen, lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan yang sebesar 91,51 persen. Pada tahun yang sama di daerah perdesaan ada sebesar 94,03 persen penduduk laki-laki dan 91,01 persen penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang melek huruf. Sementara itu, di daerah perkotaan ada sebesar 97,39 persen penduduk laki-laki dan 93,15 persen penduduk perempuan yang melek huruf.

Tabel 4.1
Angka Melek Huruf Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Jenis Kelamin (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan+Perdesaan (4)
Laki-laki (Lk)	97.39	94.03	94,84
Perempuan (Pr)	93.15	91.01	91,51
Lk + Pr	95.28	92.51	93,17

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Hampir seluruh penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan tahun 2020 pada kelompok umur 15-24 tahun bisa membaca dan menulis yaitu sebesar 99,75 persen dan 99,38 persen. Sedangkan angka melek huruf pada kelompok umur 25-34 tahun di daerah perkotaan dan perdesaan memiliki angka melek huruf sedikit lebih rendah yakni 97,16 persen dan 96,94 persen. Selanjutnya, penduduk usia 50 tahun ke atas di daerah perkotaan yang melek huruf tercatat sebesar 87 persen, jauh lebih tinggi dibanding daerah perdesaan yang hanya sekitar 78,52 persen. Secara

umum baik di wilayah perdesaan dan perkotaan kelompok umur 15-34 tahun memiliki angka melek huruf yang relatif tinggi yaitu di atas 95 persen.

Tabel 4.2
Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur
dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Kelompok Umur	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
15-24	99.75	99.38	99.47
25-34	97.16	96.94	96.99
35-49	98.03	93.19	93.84
50+	87,00	78.52	80.59

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Kelompok umur 50 tahun ke atas memiliki angka melek huruf di bawah 90 persen dan ini merata baik di perkotaan, perdesaan maupun perkotaan dan perdesaan. Dari Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis atau buta huruf lebih banyak pada kelompok penduduk usia tua terutama di daerah perdesaan.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas.

Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah sebesar 7,90 tahun, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 8,22 tahun. Selanjutnya pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat menjadi 8,33 tahun. Ini berarti rata-rata penduduk Sulawesi Barat baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas II sampai III SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk perempuan yakni masing-masing sebesar 8,48 tahun dan 8,18 tahun.

Tabel 4.3
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Barat, 2018-2020

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki (Lk)	8,00	8.37	8.48
Perempuan (Pr)	7,80	8.08	8.18
Lk + Pr	7,90	8.22	8.33

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2018-2020

Dunia pendidikan di Sulawesi Barat masih menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah keluhan mengenai kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2020 yang sudah menamatkan sekolah pada jenjang SMP ke atas yaitu pada jenjang SMP, Sekolah Menengah Umum (SMU), Diploma I/II/III/IV Universitas (S1/S2/S3) di Sulawesi Barat sudah mencapai 50,78 persen. Lebih dari seperempat penduduk berumur 15 tahun ke atas ialah penduduk memiliki ijazah SD. Pada urutan kedua, penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMU/ Sederajat.

Sementara itu jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD pada tahun 2020 adalah sebesar 22,05 persen. Jika dilihat sebaran wilayahnya, penduduk di perdesaan lebih banyak tidak memiliki ijazah SD jika dibandingkan dengan di wilayah perkotaan.

Tabel 4.4
 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut
 Ijazah /STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal
 di Sulawesi Barat, 2020

Jenjang Pendidikan (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan+Perdesaan (4)
Tidak Memiliki Ijazah SD	17.06	23.60	22.05
SD/Sederajat	20.09	29.38	27.17
SMP/Sederajat	18.76	18.11	18.26
SMU/Sederajat	29.69	21.78	23.66
Diploma I/II/III/ IV/Universitas	14.41	7.13	8.86

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Pada tahun 2020, Penduduk 15 tahun ke atas di daerah perkotaan sudah lebih banyak yang berpendidikan minimal SMU sederajat dibandingkan dengan daerah perdesaan dengan masing-masing sebanyak 29,69 persen di perkotaan dan 21,78 persen. Sebaliknya, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki Ijazah SD/sederajat di perdesaan lebih banyak dibandingkan perkotaan. Penduduk yang memiliki Ijazah SD/sederajat di perdesaan sebanyak 29,38 persen sedangkan di daerah perkotaan 20,09 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan perdesaan.

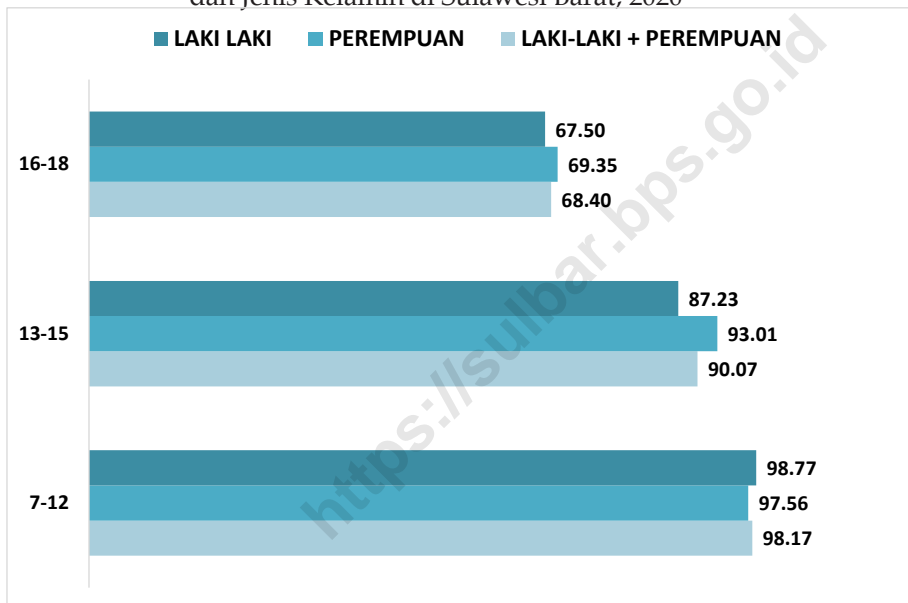
Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang disebut dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2020 sebesar 98,17 persen dan jika dilihat menurut jenis kelamin, tampak bahwa angka partisipasi sekolah anak laki-laki usia 7-12 tahun lebih tinggi dibanding anak perempuan pada kelompok umur yang sama.

Pada tahun 2020, angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun sebesar 90,07 persen, di mana pada

Gambar 4.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah
dan Jenis Kelamin di Sulawesi Barat, 2020

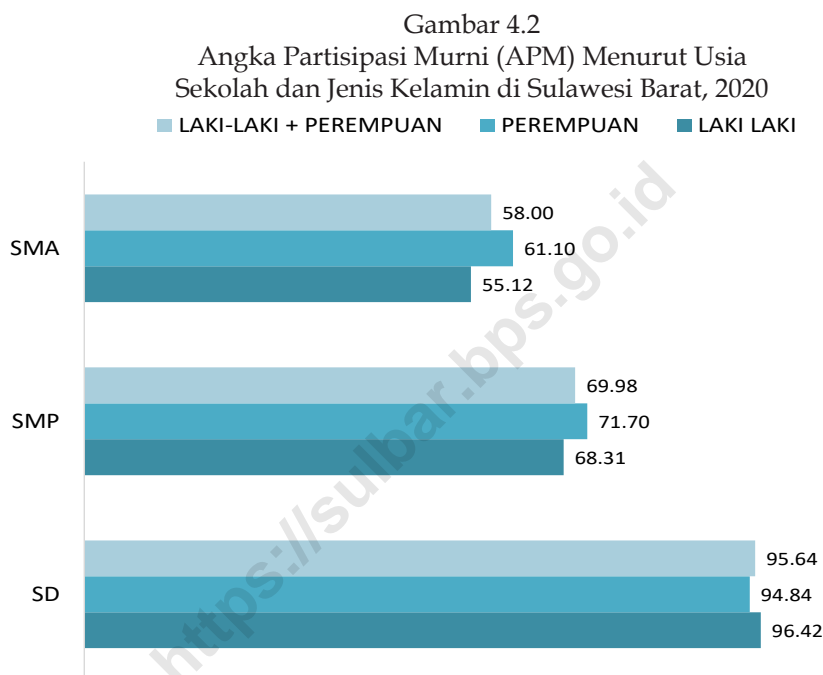


Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

kelompok usia ini APS perempuan lebih besar dibanding APS laki-laki yakni sebesar 93,01 persen untuk perempuan dan 87,23 persen untuk laki-laki. Sedangkan untuk APS penduduk usia 16-18 tahun sebesar 68,40 persen dengan komposisi APS perempuan sebesar 69,35 persen dan 67,50 persen untuk laki-laki. Sehingga secara umum APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki untuk kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Sedikit berbeda dengan APS, Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Selain itu dapat juga untuk melihat proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SM atau Sekolah Menengah untuk penduduk usia 16-18 tahun.



Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Secara umum, pada tahun 2020 angka partisipasi murni penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. APM perempuan juga selalu lebih tinggi dari APM penduduk Sulawesi Barat di jenjang pendidikan SMP dan SMA. APM jenjang SD tahun 2020 sebesar 95,64 persen dengan APM SD anak perempuan sebesar 94,84 persen dan APM SD anak laki-laki sebesar 96,42 persen. Selanjutnya, APM SMP Sulawesi Barat pada tahun 2018 sebesar 69,98 persen dengan APM SMP anak perempuan sebesar 71,70 persen dan APM SMP anak laki-laki sebesar 68,31 persen. Kemudian APM SMA penduduk Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 58,00 persen yaitu untuk APM SMA

perempuan sebesar 61,10 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan APM SMA laki-laki yang sebesar 55,12 persen.

<https://sulbar.bps.go.id>

BAB

5

KETENAGAKERJAAN

<https://sulit.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK adalah perbandingan jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan TPT memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan). Adapun sumber data yang digunakan untuk analisis berasal dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPAK pada tahun 2020 tampak meningkat dibandingkan tahun 2019. TPAK pada tahun 2019 sebesar 69,89 persen, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 70,19 persen. Jika dibedakan menurut tempat tinggal TPAK perdesaan lebih

tinggi dari perkotaan yakni sebesar 70,92 persen dan 67,36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berpotensi secara ekonomis untuk melakukan pekerjaan lebih banyak berada di perdesaan.

Tabel 5.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020

Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	69.38	67.36	4.03	4.82
Perdesaan	70.03	70.92	2.71	2.96
Perkotaan+ Perdesaan	69.89	70.19	2.98	3.32

Sumber : Diolah dari hasil Sakernas 2019-2020

Peningkatan TPAK di tahun 2020 tidak diikuti penurunan angka TPT di tahun yang sama. Berdasarkan tabel 5.1 di atas, TPT terlihat meningkat dari 2,98 persen pada tahun 2019 menjadi 3,32 persen pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kondisi ekonomi secara makro yang mengakibatkan tingkat kesempatan kerja menurun. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT di perdesaan pada periode tahun 2019-2020 selalu lebih rendah dibandingkan dengan TPT di perkotaan. Hal ini disebabkan karena sektor potensial yang masih menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk Sulawesi Barat terdapat di perdesaan, sehingga pengangguran lebih sedikit di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini didukung pula oleh angka TPAK di daerah perdesaan lebih tinggi nilainya dari angka TPAK perkotaan. Selain itu, pada tahun 2020, TPT di wilayah perkotaan terlihat meningkat dibandingkan tahun 2019, begitupun pada wilayah perdesaan.

TPT menurut tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 5.2 di bawah. TPT cenderung lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang menengah dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebabnya adalah lapangan pekerjaan untuk pendidikan yang lebih tinggi terbatas, sementara bagi yang berpendidikan lebih tinggi lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Berbeda dengan jenis pekerjaan untuk penduduk berpendidikan rendah, yang tidak membutuhkan keterampilan khusus.

Pada tahun 2020, TPT penduduk yang berpendidikan SLTA lebih tinggi dibandingkan dengan TPT penduduk dengan pendidikan Diploma I/II/III Akademi dan Universitas. Hal itu juga jelas terlihat pada tingkat pendidikan SLTP ke bawah, yang mencapai hampir sepertiga dari TPT SLTA. TPT dengan pendidikan SLTA sebesar 6,37 persen sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III Akademi dan Universitas, angka TPT sebesar 4,48 persen dan SLTP ke bawah sebesar 1,94

Tabel 5.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut
Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal
di Sulawesi Barat, 2019-2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2019 (2)	2020 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2019 (6)	2020 (7)
Rendah (SLTP ke bawah)	1.74	3.64	1.24	1.60	1.32	1.94
Menengah (SMU+SMK)	6.95	7.03	6.04	6.18	6.26	6.37
Tinggi (Diploma I/II/III/Akademi dan Univ)	5.05	5.04	4.70	4.21	4.83	4.48
Total	4.03	4.82	2.71	2.96	2.98	3.32

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2019-2020

persen. Selama periode 2019-2020, TPT penduduk dengan tingkat pendidikan Rendah dan Menengah mengalami peningkatan sementara TPT penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi mengalami penurunan.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT penduduk perkotaan lebih tinggi pada semua tingkat dibandingkan dengan daerah perdesaan. Kondisi ini sejalan dengan jumlah pengangguran secara umum, jumlah pengangguran pada tahun 2020 di perkotaan yakni 4,82 persen, lebih tinggi dari total pengangguran di perdesaan yang sebesar 2,96 persen. Selain itu, TPT di wilayah perkotaan menunjukkan peningkatan dari 4,03 persen menjadi 4,82 persen.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Sektor pertanian masih menjadi tumpuan harapan kebanyakan masyarakat Sulawesi Barat. Hal tersebut tercermin dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data sakernas 2020, sebanyak 50,19 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Jika dilihat menurut daerahnya, penduduk di daerah perdesaan paling banyak bekerja di sektor pertanian. Tercatat sebanyak 57,49 persen penduduk perdesaan bekerja di sektor pertanian. Lain halnya dengan penduduk di daerah perkotaan yang bekerja di sektor pertanian hanya sekitar 19,84 persen. Sektor berikutnya yang menjadi pilihan masyarakat di Sulawesi Barat adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel. Sekitar 17,11 persen penduduk di Sulawesi Barat bekerja di sektor tersebut. Penduduk di perkotaan lebih banyak bekerja di sektor tersebut yaitu sebanyak 31,72 persen, sedangkan penduduk di perdesaan yang bekerja di sektor ini hanya 13,59 persen. Dua sektor yang sedikit menyerap tenaga kerja di Sulawesi Barat adalah industri pengolahan dan lainnya dengan masing-masing sebesar 7,64 persen dan 10,48 persen.

Bila dilihat menurut status pekerjaan, pada tahun

Tabel 5.3
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha
dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020

Kelompok Lapangan Usaha (1)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2019 (2)	2020 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2019 (6)	2020 (7)
1	18.45	19.84	53.98	57.49	46.82	50.19
2	9.21	9.64	8.41	7.16	8.57	7.64
3	30.67	31.72	14.83	13.59	18.02	17.11
4	25.81	24.14	12.26	12.28	14.99	14.58
5	15.86	14.66	10.52	9.48	11.60	10.48

Sumber : Diolah dari hasil Sakernas Agustus 2019-2020

Catatan : 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

2. Industri Pengolahan

3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel.

4. Jasa Kemasyarakatan, sosial, dan perorangan

5. Lainnya (Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, dan Air;
Bangunan; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha
Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)

2020 mayoritas pekerja di Sulawesi Barat merupakan buruh/karyawan dengan persentase sebesar 25,20 persen, kemudian diikuti oleh penduduk yang berusaha dibantu pekerja tidak dibayar sebesar 23,76 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga sebesar 21,45 persen. Persentase terkecil yaitu penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap sebesar 2,17 persen. Berikutnya adalah penduduk yang berusaha sendiri sebesar 20,66 persen dan pekerja bebas sebesar 6,76 persen.

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggalnya, mayoritas penduduk perdesaan memiliki status pekerjaan sebagai pekerja yang berusaha dibantu dengan pekerja tidak dibayar sebesar 25,69 persen. Kemudian pekerja keluarga sebesar 23,02 persen, meningkat jika dibandingkan dengan

kondisi di tahun 2019. Sedangkan di perkotaan, mayoritas penduduk berstatus buruh/karyawan sebesar 35,59 persen dan penduduk yang berusaha sendiri sekitar 25,48 persen. Dari tahun 2019-2020 persentase penduduk dengan status pekerja keluarga secara umum meningkat baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 5.4
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020

Status Pekerjaan (1)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2019 (2)	2020 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2019 (6)	2020 (7)
Berusaha Sendiri	24.06	25.48	20.89	19.50	21.52	20.66
Berusaha Dibantu Pekerja Tidak Dibayar	14.01	15.73	26.33	25.69	23.85	23.76
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	4.11	2.47	1.32	2.09	1.88	2.17
Buruh/Karyawan	42.73	35.59	22.04	22.71	26.21	25.20
Pekerja Bebas	4.97	5.80	9.07	6.99	8.25	6.76
Pekerja Keluarga	10.12	14.93	20.34	23.02	18.28	21.45

Sumber : Diolah dari hasil Sakernas 2019-2020

Jumlah Jam Kerja

Idealnya seorang pekerja bekerja sesuai jam kerja yang telah disepakati, yaitu minimal 35 jam selama seminggu. Tabel 5.5 menggambarkan persentase penduduk yang bekerja baik di bawah jam kerja normal yang dapat dikategorikan sebagai pengangguran tidak kentara (*visible underemployed*) maupun yang jam kerjanya lebih dari 35 jam selama seminggu.

Pada tahun 2020, pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu yang lalu sebesar 52,69 persen,

Tabel 5.5
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang
 Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu dan
 Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Daerah Tempat Tinggal	0*)	1-34 jam	35+ Jam
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	4.44	40.41	55.15
Perdesaan	4.28	55.64	40.08
Perkotaan+ Perdesaan	4.31	52.69	43.00

Sumber : Diolah dari hasil Sakernas 2020

Catatan : *) Jumlah jam kerja penduduk yang mempunyai pekerjaan / usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja.

sedangkan pekerja yang bekerja lebih dari 35 jam sebesar 43,00 persen. Sementara itu, penduduk yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti cuti, sakit, menunggu panen atau mogok kerja dengan jam kerja 0 (nol) jam, yaitu sebesar 4,31 persen.

Bila dibedakan menurut tempat tinggal, walaupun TPT di daerah perdesaan lebih rendah dari TPT Sulawesi Barat (gabungan perkotaan dan perdesaan), atau dengan kata lain tingkat kesempatan kerja di perdesaan lebih tinggi. Namun bila dilihat dari jumlah jam kerja, justru penduduk yang bekerja di perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah jam kerja normal. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu di perdesaan lebih dari separuh dari jumlah penduduk yang bekerja atau sebesar 55,64 persen, sedangkan di perkotaan hanya 40,41 persen. Sementara persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja lebih dari 35 jam di perkotaan mencapai 55,15 persen dan di perdesaan hanya sebesar 40,08 persen.

BAB

6

**TARAF DAN POLA
KONSUMSI**

<https://id.libapps.go.id>

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk (walaupun tidak selamanya demikian). Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk tercapai atau tidaknya aspek pemerataan. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan.

Perkembangan Kemiskinan

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah nyata dalam penanggulangannya. Salah satu penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Salah satu kebijakan kurun waktu 2005-2025 seperti

tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di antaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,00 sampai 7,0 persen selama tahun 2020 sampai 2024.

Program yang dijalankan pemerintah antara lain bantuan/subsidi bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur perdesaan dan sokongan kepada pelaku usaha, termasuk di dalamnya Bantuan Pangan Non Tunai dan BLT UMKM. Selain itu dilaksanakan juga Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan lainnya, yang kesemua program tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah *head-count index* (P0).

Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada suatu wilayah. Namun demikian, indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah atau seberapa dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak akan berubah jika seseorang yang miskin menjadi bertambah miskin.

Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain lagi guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata

pada kesenjangan antar standar hidup penduduk miskin dibanding garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P₂ mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Tabel 6.1
Perkembangan Kemiskinan di Sulawesi Barat, 2018-2020

Indikator Kemiskinan (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)
1. Persentase Penduduk Miskin (P ₀)			
- Perkotaan			
Persentase	9,64	9.36	9.59
Jumlah (ribu)	30,76	31.28	31.67
-Perdesaan			
Persentase	11,75	11.45	11.26
Jumlah (ribu)	121,02	120.12	120.34
-Perkotaan+Perdesaan			
Persentase	11,25	11.02	10.87
Jumlah (ribu)	151,78	151.4	152.02
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			
- Perkotaan	1,22	1.32	1.93
- Perdesaan	1,92	1.88	1.87
- Perkotaan+Perdesaan	1,76	1.75	1.89
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)			
- Perkotaan	0,27	0.26	0.53
- Perdesaan	0,50	0.47	0.47
- Perkotaan+Perdesaan	0,44	0.42	0.48

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2018-2020

Catatan : *Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kilo kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK).*

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat, sedikit

meningkat dari 151,4 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 152,02 ribu jiwa di tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 390 jiwa dan 220 jiwa pada tahun 2020. Meskipun secara jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat tahun 2020 meningkat, namun persentase penduduk miskin di tahun 2020 menurun sebesar 0,15 poin persen.

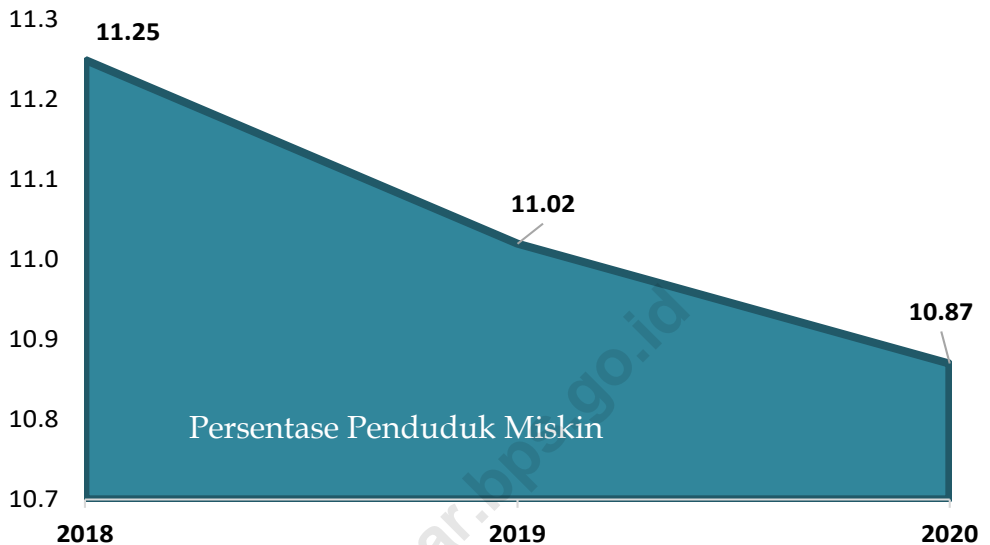
Jika dilihat menurut daerah, pola distribusi persebaran penduduk miskin masih sama, yaitu persentase penduduk miskin di daerah perdesaan jauh lebih besar daripada daerah perkotaan. Pada Tahun 2019, penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 11,45 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 9,36 persen. Begitu pun pada tahun 2020, penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 11,26 persen dan di daerah perkotaan 9,59 persen.

Persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu juga memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan). Oleh karena itu selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,75 pada tahun 2019 menjadi 1,89 pada tahun 2020. Sama halnya dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan yang meningkat dari 0,42 menjadi 0,48. Meningkatnya nilai indeks ini mengindikasikan besarnya jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin melebar. Nilai (P1) pada tahun 2018-2019 berdasarkan Tabel 6.1 menunjukkan bahwa nilai Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan daerah perkotaan selalu lebih

rendah daripada daerah perdesaan. Sedangkan pada tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan

Gambar 6.1
Perkembangan Kemiskinan di Sulawesi Barat, 2018-2020



Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2018-2020

Kemiskinan daerah perdesaan lebih rendah daripada daerah perkotaan.

Tingkat Kesejahteraan

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari Tabel 6.2 terlihat bahwa sebagian besar penduduk Sulawesi Barat berada pada golongan pengeluaran 500.000-749.000 rupiah yaitu sebanyak 25,20 persen. Rata-rata pengeluaran penduduk pada golongan pengeluaran ini adalah sebanyak 616.901 rupiah per bulan. Persentase penduduk terbesar berikutnya yaitu pada golongan pengeluaran 300.000-499.999 rupiah dengan persentase 24,55 persen. Penduduk pada golongan pengeluaran ini rata-rata mengeluarkan 405.530 rupiah per bulannya. Sedangkan persentase penduduk paling sedikit

Tabel 6.2
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) dan
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran
di Sulawesi Barat, 2020

Golongan Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per bulan	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
(1)	(2)	(3)
< 150 000	-	0
150 000-199 999	183,775	0.21
200 000-299 999	261,289	5.81
300 000-499 999	405,530	24.55
500 000-749 999	616,901	25.20
750 000-999 999	867,279	15.74
1 000 000-1 499 999	1,211,091	17.02
1 500 000+	2,443,705	11.48
Total	893,761	100.00

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

yaitu pada kelompok pengeluaran 150.000-199.999 rupiah yaitu sebanyak 0,21 persen. Pengeluaran rata-rata yang dikeluarkan penduduk pada golongan pengeluaran ini adalah sekitar 183.775 rupiah.

Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Angka Garis Kemiskinan

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah. Sebaliknya elastisitas

permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan

Tabel 6.3
Angka Garis Kemiskinan (Rp) Menurut Jenis
Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal
di Sulawesi Barat, 2019-2020

Tahun/Daerah	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Tahun 2019</u>			
Perkotaan (Rp)	261 198	67 608	328 806
(%)	(79.44)	(20.56)	(100)
Perdesaan (Rp)	252 528	75 486	328 014
(%)	(76.99)	(23.01)	(100)
Perkotaan + Perdesaan (Rp)	254 518	73, 26	328 144
(%)	(77.56)	(22.44)	(100)
<u>Tahun 2020</u>			
Perkotaan (Rp)	277 068	77 925	354 993
(%)	(78.05)	(21.95)	(100)
Perdesaan (Rp)	268 940	80 755	349 695
(%)	(76.91)	(23.09)	(100)
Perkotaan + Perdesaan (Rp)	270 655	80 088	350 743
(%)	(77.17)	(22.83)	(100)

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2019-2020
Angka dalam kurung adalah persentase

akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

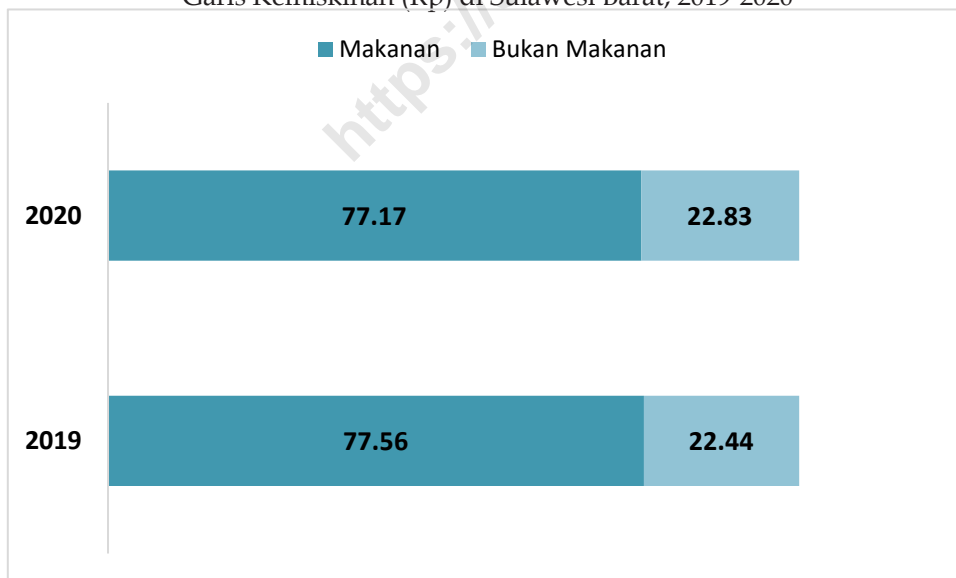
Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan

sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pada Tabel 6.3, berdasarkan Angka Garis Kemiskinan terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Persentase pengeluaran makanan untuk tahun 2019 sebesar 77,56 persen, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 77,17 persen. Hal sebaliknya terjadi pada persentase pengeluaran untuk bukan makanan. Pada tahun 2019 persentasenya 22,44 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 22,83 persen. Hal ini memberi gambaran bahwa, penduduk Sulawesi Barat yang berada pada garis kemiskinan mengalami sedikit kenaikan kesejahteraan selama periode 2019-2020.

Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, wilayah

Gambar 6.2
Persentase Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran pada Angka Garis Kemiskinan (Rp) di Sulawesi Barat, 2019-2020



Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2019-2020

BAB

7

**PERUMAHAN
DAN
LINGKUNGAN**

<https://ulbbppc.go.id>

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Manusia dan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa merupakan alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal tetap dan merupakan kebutuhan pokok selain kebutuhan sandang dan pangan. Dengan kata lain rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Pada saat ini keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan tetapi rumah sudah menjadi bagian gaya hidup dan simbol status bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya.

Manusia membutuhkan rumah di samping sebagai tempat untuk berteduh atau berlindung dari hujan dan panas, juga menjadi tempat berkumpulnya para penghuni yang merupakan satu ikatan keluarga. Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, di mana kualitas tersebut ditentukan

oleh fisik rumah tersebut yang dapat dilihat dari fasilitas yang digunakan sehari-hari.

Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum dan fasilitas tempat buang air besar. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila rumah tersebut memiliki dinding, atap dan lantai. Di samping itu kualitas ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Berdasarkan data Susenas 2020, rumah yang berlantai tidak layak di Sulawesi Barat menunjukkan adanya penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari 3,38 persen menjadi 3,26 persen. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada tahun 2020 rumah-rumah yang berada di wilayah perdesaan yang berlantai tidak layak masih lebih banyak dibanding di wilayah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,80 persen dan 1,45 persen.

Tabel 7.1
 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa
 Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat
 Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020

Indikator Kualitas Perumahan	2019	2020		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lantai Tak layak**)	3.38	1.45	3.80	3.26
Atap Layak ⁾	95.72	97.50	95.16	95.70
Dinding Tembok	48.20	62.14	47.75	51.05

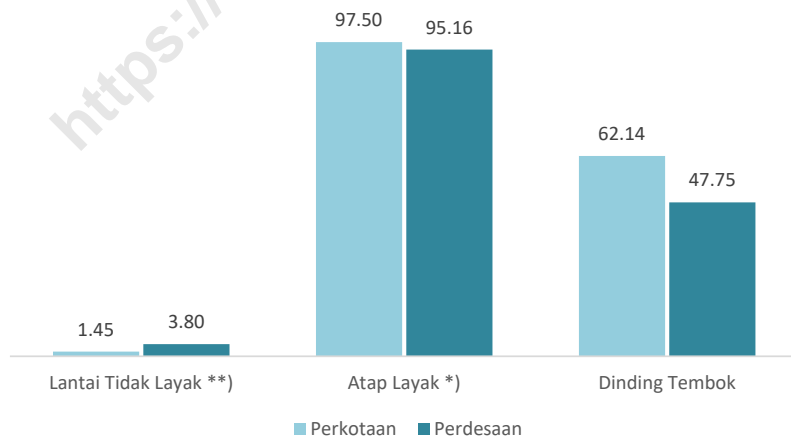
Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2019-2020

⁾ Tidak beratap dedaunan

** Lantai terluas tanah, bambu, dan lain-lain

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding. Secara umum pada tahun 2020 rumah tinggal dengan atap layak mencapai 95,70 persen. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, perumahan beratap layak di daerah perkotaan maupun perdesaan sudah cukup tinggi mencapai 97,50 persen di perkotaan dan 95,16 persen di daerah perdesaan. Sementara rumah tinggal yang berdinding tembok di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yaitu dari 48,20 persen di tahun 2019 menjadi 51,05 persen tahun 2020. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, kualitas rumah dengan dinding tembok di daerah perkotaan mencapai 62,14 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 47,75 persen.

Gambar 7.1
 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020



Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Pada tahun 2020 rumah tangga yang memiliki luas tempat tinggal kurang dari 7,2 meter persegi per anggota rumah tangga sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 10,77 persen menjadi 11,50 persen. Jika ditinjau menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2020 persentase

rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi per anggota rumah tangga di daerah perkotaan sebesar 10,74 persen, lebih rendah dari persentase rumah tangga di daerah perdesaan yang sebesar 11,73 persen.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan nyaman tidaknya rumah tinggal tersebut. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki adalah jamban milik sendiri.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Air minum berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Pada Tahun 2020, rumah tangga di Sulawesi barat yang menggunakan sumber Air minum layak sebesar 72,75 persen. Bila dilihat berdasarkan wilayahnya, rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki sumber air minum layak jauh lebih tinggi proporsinya dibanding di wilayah perdesaan yaitu masing masing sebesar 89,70 persen dan 67,71 persen.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan.

Klasifikasi pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Selama tahun 2019-2020 di Sulawesi Barat persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 67,35 persen, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 73,31 persen. Rumah tangga yang memiliki jamban sendiri lebih besar proporsinya di daerah perkotaan, yaitu sebesar 76,25 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 72,44 persen.

Tabel 7.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020

Indikator Kualitas Perumahan	2019	2020		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Luas Lantai Per Kapita < 7,2 m ²	10.77	10.74	11.73	11.50
Air Minum Layak ^{*)}	71,50	89,70	67,71	72,75
Jamban Sendiri	67.35	76.25	72.44	73.31

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2019-2020

^{*)} Air yang bersumber dari air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa dengan jarak ke pembuangan limbah ≥ 10 m

Tabel 7.3
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Penerangan Listrik
 Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2019-2020

Daerah Tempat Tinggal	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	99.64	99.21
Perdesaaan	97.54	98.50
Perkotaan + Perdesaan	98.03	98.66

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2019-2020

Fasilitas perumahan lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik, karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber cahaya lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019, di Sulawesi Barat terdapat 98,03 persen rumah tangga menggunakan penerangan listrik. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,66 persen rumah tangga.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada tahun 2020 rumah tangga di daerah perkotaan yang sudah menggunakan penerangan listrik sebanyak 99,21 persen. Sedangkan di daerah perdesaan rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik sebanyak 98,5 persen, meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yakni 97,54 persen.

BAB
8

SOSIAL LAINNYA

<https://sullab.bps.go.id>

SOSIAL LAINNYA

Indikator sosial lainnya yang mencerminkan kesejahteraan adalah persentase rumah tangga yang memiliki/menerima “jaminan sosial”, persentase penduduk yang menikmati informasi dan hiburan, meliputi menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar dan mengakses internet. Selain itu, persentase rumah tangga yang menguasai media informasi seperti telepon, handphone dan komputer, serta banyaknya rumah tangga yang membeli beras miskin/murah (raskin) juga dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan.

“Jaminan sosial” dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang karena jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, dengan adanya jaminan sosial tersebut, kesejahteraan seseorang di usia senja sedikit lebih terjamin dibandingkan seseorang yang tidak memiliki jaminan sosial tersebut. Sedangkan kepemilikan dan akses terhadap media informasi merupakan basis perkembangan pengetahuan seseorang yang dapat merubah pandangan dan cara hidupnya ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kepemilikan dan akses terhadap media informasi juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang. Sedangkan persentase rumah tangga yang membeli raskin menunjukkan seberapa banyak rumah tangga yang memanfaatkan program pemerintah dalam mensejahterakan rumah tangga miskin.

Kepemilikan Jaminan Sosial

Jenis Jaminan sosial yang digunakan BPS dalam susenas ada 5 yaitu Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Kematian, dan Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan Tabel 8.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2020, jaminan pensiun/veteran merupakan jaminan sosial yang paling banyak dimiliki dibandingkan dengan jaminan sosial lainnya. Ada sebanyak 8,51 persen rumah tangga yang memiliki jaminan tersebut. Selanjutnya kepemilikan asuransi kecelakaan menempati posisi kedua terbanyak. Sebanyak 7,63 persen rumah tangga memiliki asuransi kecelakaan. Kemudian kepemilikan jaminan hari tua menempati posisi ketiga sebesar 7,52 persen. Diikuti kepemilikan asuransi kematian sebesar 7,25 persen dan pesangon PHK sebesar 4,16 persen.

Tabel 8.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Jenis Jaminan Sosial (1)	Perkotaan (2)	Perdesasaan (3)	Perkotaan + Perdesasaan (4)
Jaminan Pensiun/Veteran	14.96	6.59	8.51
Jaminan Hari Tua	11.96	6.20	7.52
Asuransi Kecelakaan	10.17	6.87	7.63
Asuransi Kematian	11.29	6.05	7.25
Pesangon PHK	4.38	4.10	4.16

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

Bila dibandingkan berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk perkotaan lebih banyak memiliki semua jenis jaminan sosial, sekitar 2 kali lipat dibandingkan daerah perdesasaan. Di daerah perkotaan kepemilikan jaminan pensiun lebih banyak dibanding jaminan sosial lainnya sedangkan di daerah perdesasaan kepemilikan

asuransi kecelakaan lebih banyak dibanding jaminan sosial lainnya

Akses Pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini, berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dapat diakses melalui berbagai media massa dan media elektronik, seperti komputer dan internet. Namun perangkat komputer dan situs internet masih belum populer di kalangan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih kecilnya persentase rumah tangga yang menguasai komputer/laptop/notebook.

Pada Tabel 8.2 tampak bahwa rumah tangga yang sudah menguasai komputer/laptop/notebook pada tahun 2020 adalah sebesar 14,11 persen. Kenyataan ini dapat memberi gambaran bahwa penguasaan komputer/laptop/

Tabel 8.2
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai
Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi Menurut
Jenis Alat Komunikasi dan Informasi dan Daerah
Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Alat komunikasi	2020		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Rumah	0.91	0.03	0.23
Telepon Seluler*)	74.19	62.11	64.98
Komputer/Laptop/ Notebook	24.56	11.01	14.11

Sumber : Diolah dari hasil Susenas 2020

^{*)} *Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke atas yang memiliki HP*

notebook sebagai media untuk mengakses informasi masih jarang dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat, hanya terjangkau untuk kalangan tertentu saja.

Bila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang menguasai komputer/laptop/notebook di perkotaan tercatat lebih tinggi. Persentase di daerah perkotaan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan di daerah perdesaan.

Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat komunikasi pada saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan telepon biasa, meskipun harga telepon seluler maupun pulsanya umumnya lebih mahal. Telepon seluler banyak diminati karena lebih praktis dibawa kemana saja sehingga memudahkan pengguna berkomunikasi di manapun berada dengan ditunjang oleh jangkauan jaringan yang semakin luas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan lebih rendahnya persentase rumah tangga yang menguasai telepon biasa dibandingkan telepon seluler. Tabel 8.2 memperlihatkan, bahwa pada tahun 2020 anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas yang menguasai telepon seluler adalah sebesar 64,98 persen. Konsep yang digunakan dalam Susenas bahwa yang dimaksud dengan telepon seluler adalah handphone dan smartphone, tetapi tidak termasuk tablet, meskipun tablet tersebut dapat digunakan untuk menelepon.

Pada tahun 2020, rumah tangga yang menguasai telepon rumah relatif sedikit yaitu hanya sebesar 0,23 persen. Bila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang menguasai telepon dan telepon seluler di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan.

Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Selain dari aspek kesejahteraan yang dilihat dari

kegiatan melakukan perjalanan “wisata” dan akses ke media massa, keadaan sosial rumah tangga juga dicakup dalam Susenas. Dalam sub bab ini keadaan sosial ekonomi rumah tangga hanya dibatasi pada banyaknya rumah tangga yang mendapat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Data yang terdapat pada Tabel 8.3 memperlihatkan bahwa rumah tangga yang menerima BPNT pada tahun 2020 sebesar 14,89 persen. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, persentase rumah tangga penerima BNPT di perdesaan adalah sebesar 14,91 hampir sama dengan di perkotaan yang sebesar 14,85 persen.

Tabel 8.3
Persentase Rumah Tangga Penerima BPNT dan Jumlah Beras yang Dibeli Menggunakan BPNT selama 4 Bulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Barat, 2020

Indikator/Tahun	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Tangga Penerima BPNT	14.85	14.91	14.89
Jumlah Beras yang dibeli menggunakan BPNT selama 4 bulan terakhir (Kg)			
<=15	3.38	5.87	5.30
>15	96.62	94.13	94.70

Sumber : Diolah dari hasil Susenas Maret 2020

Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang membeli beras menggunakan program BPNT dengan volume 15 kg kebawah selama empat bulan terakhir ada sebanyak 5,30 persen. Sebaliknya rumah tangga yang

membeli menggunakan program BPNT dengan volume diatas 15 kg selama empat bulan terakhir ada sebesar 94,70 persen.

Bila diperhatikan menurut daerah, terlihat bahwa persentase rumah tangga yang membeli beras menggunakan program BPNT selama empat bulan terakhir baik di daerah perdesaan maupun di perkotaan untuk pembelian diatas 15 kilogram ke atas di tahun 2020 lebih besar dibandingkan

<https://sulbar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2008-2019, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010- 2035, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008-2019, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. Statistik Indonesia 2008-2020, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2019-2020, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2019, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2020, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, 2018. Statistik Angkatan Kerja Sulawesi Barat 2014-2017, Sulawesi Barat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, 2019. Statistik

Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Barat 2014-2019, Sulawesi Barat: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, 2020. Sulawesi Barat Dalam Angka 2009-2020, Sulawesi Barat: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, 2020. Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Barat 2009-2020, Sulawesi Barat: Badan Pusat Statistik.

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-jaminan-kesehatannasional-jkn/>

<https://sulbar.bps.go.id>

SUMBER DATA

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan setiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar kependudukan dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

Sensus Penduduk menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap tahun. Susenas mengumpulkan data mengenai kependudukan, pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan atau lingkungan hidup, program-program perlindungan sosial yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, serta perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan Kor (pokok). Karakteristik sosial ekonomi yang lebih spesifik

dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- a) Konsumsi/Pengeluaran/Pendapatan,
- b) Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman,
- c) Sosial Budaya, Kesejahteraan Rumah Tangga, Kriminalitas.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu samapai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik kedalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun sekali). Pada tahun 2006 ukuran sampelnya sekitar 280 ribu rumah tangga dan pada tahun 2011 ukuran sampelnya bertambah menjadi sekitar 300 ribu rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantri statistik (sekarang KSK) dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.

Mulai tahun 2011 pengumpulan data Susenas meliputi pertanyaan di kuesioner Kor dengan ditambah kuesioner Modul Konsumsi/Pengeluaran/Pendapatan, sebagai ganti dari Modul Konsumsi/Pengeluaran/Pendapatan yang dijadikan pendamping kuesioner Kor adalah Modul Ketahanan Sosial (Modul Hansos). Jadi yang awalnya Modul Konsumsi dilaksanakan setiap tiga tahun, mulai tahun 2011 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu dalam satu tahun terdapat empat kali pelaksanaan Susenas. Adapun pelaksanaan Susenas secara triwulanan dimulai pada triwulan I-IV, yang masing-masing pelaksanaannya pada Bulan Maret, Juni, September dan Desember. Petugas Susenas diutamakan adalah KSK.

Tahun 2015 BPS melakukan perubahan dalam penyelenggaraan Susenas. Perubahan tersebut adalah :

- a) Pencacahan Susenas dilaksanakan dua kali setahun, masing-masing bulan Maret dan September.
- b) Pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel besar untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota, pencacahan bulan September dengan ukuran sampel kecil untuk menghasilkan data yang representatif hanya untuk estimasi provinsi dan nasional.
- c) Setiap periode pencacahan menggunakan dua kuesioner yaitu bulan Maret menggunakan kuesioner Kor dan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran, sedangkan bulan September menggunakan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran dan kuesioner Modul (Pendidikan dan Sosial Budaya atau Kesehatan dan Perumahan atau Ketahanan Sosial) sesuai siklus tahun pendataannya.
- d) Sejumlah variabel pokok dari kuesioner Kor yang harus selalu dikumpulkan datanya pada setiap periode pencacahan akan menjadi bagian dari materi kuesioner Modul.

Pemilihan sampel Susenas mulai tahun 2011 dilakukan secara computerized yaitu dengan program komputer dalam penarikan sampelnya. Diharapkan dengan metode ini sampel Susenas akan berbeda untuk setiap pelaksanaan lapangannya, sehingga bisa lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Surevi Sosial
Ekonomi
Nasional
Panel

Susenas Panel merupakan suatu survei yang ditujukan untuk mengumpulkan data konsumsi/pengeluaran yang akan digunakan untuk menghitung perkiraan penduduk miskin nasional secara tahunan. Survei ini dilakukan sejak tahun 2003 dengan sampel yang merupakan sub sampel rumah tangga modul konsumsi/pengeluaran 2002. Sedangkan pada Susenas panel tahun 2004 sampel rumah

tangga terpilih merupakan rumah tangga yang sama pada Susenas panel 2003. Jumlah sampel pada tahun-tahun tersebut sebanyak 10.512 rumah tangga. Sedangkan, jumlah sampel pada tahun 2006 lebih dari 10.640 rumah tangga yang diperoleh dari hasil listing. Susenas panel pada tahun 2006 dilaksanakan pada bulan Januari-Februari. Hasil Susenas panel ini digunakan untuk menghitung perkiraan penduduk miskin dan berbagai indikator kesejahteraan rakyat untuk tingkat nasional secara cepat. Mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Susenas dilakukan dua kali dalam setahun yakni pada bulan Maret dan Juli.

Pada tahun 2011, Susenas panel dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Susenas triwulan I yaitu pada bulan Maret. Sampel Susenas Panel merupakan sub sampel Susenas pada tahun 2010, dan sampel tidak mengalami perubahan sampai tahun 2014.

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tetapi mulai tahun 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005, 2006, dan 2007 Sakernas dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 sampai 2010 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.

Tahun 2011 pelaksanaan Sakernas kembali dilakukan secara triwulanan, yaitu triwulan I-IV dengan bulan pelaksanaan Februari, Mei, Agustus dan November. Khusus pada bulan Agustus sampel Sakernas mengalami penambahan yang cukup banyak sehingga disebut juga

Sakernas tahunan (untuk membedakan dengan Sakernas triwulanan). Sampel Sakernas triwulanan kecuali untuk sampel Sakernas tahunan, mengalami rotasi sampel disesuaikan dengan jumlah rumah tangga hasil listing setiap blok sensus untuk setiap triwulannya.

Mulai tahun 2015 pelaksanaan Sakernas dilaksanakan secara semesteran yaitu Semester I pada bulan Februari dan Semester II pada bulan Agustus. Sakernas Semester II yang dilaksanakan pada bulan Agustus disebut juga Sakernas tahunan. Sampel Sakernas pada Semester I sebesar 50 ribu rumah tangga, sedangkan pada Sakernas tahunan sampelnya sebesar 200 ribu rumah tangga. Mulai tahun 2014, pemilihan sampel Sakernas juga dilakukan secara computerized dan diteruskan sampai dengan tahun 2015.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tlp. (0426) 22103 Fax. (0426) 21265

Jl. RE. Martadinata No 10 Mamuju

Email: sulbar@bps.go.id

Homepage: <http://sulbar.bps.go.id>